

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menuju Negara maju, terlihat dari penilaian dunia. Amerika sudah moncoret Indonesia sebagai Negara berkembang, seperti yang dilansir dalam sebuah artikel yang menyebutkan bahwa “Indonesia, serta beberapa Negara lain telah dihapus dari daftar ‘negara-negara berkembang’ oleh Amerika Serikat (AS), dan dianggap sebagai ‘Negara maju’”. Perumuman itu disampaikan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) melalui pernyataan pada Senin (10/2/2020). (CNBC Indonesia, 2020). Terlihat beberapa tahun belakang, khususnya era Bapak Jokowi sarana pembangunan infrastruktur mulai berkembang, seperti pembangunan jalan tol di pulau Jawa serta diluar pulau Jawa. Peningkatan sarana transportasi, seperti taksi online, ojek online serta masih banyak lagi. Ibu kota sendiri memiliki sarana yang lebih canggih dibanding kota lain yang dapat meningkatkan hubungan lebih cepat antar daerah maupun kawasan seperti LRT dan MRT.

Pembangunan di Indonesia dalam empat tahun (2015-2019), pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sejak tahun 2015, pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif, yakni pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Anggaran infrastruktur terus meningkat dari Rp 155 triliun pada tahun 2014 menjadi sekitar Rp 410 triliun pada tahun 2018. Dikutip dari rilis resmi Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia serta peningkatan daya saing nasional. (kemenkeu.go.id). Serta peningkatan anggaran belanja infrastruktur di tahun 2019 mencapai Rp 420 triliun. (CNBM Indonesia, 2020).

Indonesia dari tahun ke tahun memiliki peningkatan pembangunan infrastruktur. Anggaran infrastruktur terus meningkat dari Rp 155 triliun pada tahun 2014 menjadi sekitar Rp 410 triliun pada tahun 2018. Berdasarkan perihal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui penentuan laba pada kontrak konstruksi di salah satu pembangunan infrastruktur yang ada di Jakarta dan di luar Jakarta, penentuan laba kontrak konstruksi ini berperan penting dalam mengatasi pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan, dimana penulis akan membandingkannya dengan teori yang ada, yaitu khususnya ditinjau dari sudut akuntansi, yang akan dituliskan dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul “Penentuan Laba pada Kontrak Konstruksi berdasarkan Pengakuan Pendapatan dan Biaya menurut PSAK No. 34 pada PT. XYZ”.

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi meliputi proyek seperti mekanikal, elektrikal, dan *plumbing* yang penyelesaiannya bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun tergantung proyek yang dikerjakan. Dalam pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Jakarta dan luar Jakarta seperti pembangunan infrastruktur jalan tol. PT. XYZ merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

perusahaan yang ikut andil dalam pembangunan tersebut, namun perusahaan ini hanya sebagai *suport* sistem dibagian *engineering*-nya saja.

Pada bidang jasa konstruksi penentuan laba, pengakuan laba, dan pendapatan serta biaya merupakan komponen dari laba rugi perusahaan yang bersifat khusus, sebab sifat aktivitas yang dilakukan dan tanggal pada saat aktivitas tersebut diselesaikan jatuh pada periode akuntansi yang berlainan. Perusahaan harus mengakui pendapatannya dengan tepat, agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menurut PSAK No. 34, pada perusahaan konstruksi dapat mengakui pendapatan, jika dilihat dari waktu pengerjaan proyek, dapat menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode kontrak selesai. Kedua metode tersebut tidak dimaklukkan penggunaannya secara bebas bersamaan. Metode persentase penyelesaian, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dalam periode akuntansi dimana pekerjaan dilakukan. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sedangkan metode kontrak selesai mengakui pendapatannya hanya pada saat kontrak telah selesai dilaksanakan, dimana seluruh biaya yang berhubungan dengan proyek telah dihitung dan jumlah pendapatannya sudah ditentukan.

1.2 Rumus Masalah

Rumusan dari penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan konsep penentuan laba pada perusahaan konstruksi sesuai dengan PSAK No. 34?
2. Bagaimana cara pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan?
3. Bagaimana cara pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan biaya yang dilakukan oleh perusahaan?
4. Bagaimana cara pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan laba yang dilakukan oleh perusahaan?
5. Bagaimana kesesuaian penerapan laba konstruksi di perusahaan dengan PSAK No. 34?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Penerapan konsep penentuan laba pada perusahaan kontrak konstruksi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.34.
2. Menguraikan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan.
3. Menguraikan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan biaya.
4. Menguraikan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan laba.
5. Mengevaluasi kesesuaian penerapan laba konstruksi di perusahaan dengan PSAK No. 34.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Bagi penulis, berguna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai konsep penentuan laba beserta komponennya yang ditinjau dari sudut pandang akuntansi, khususnya mengenai bidang usaha jasa konstruksi.
2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam hal pengakuan pendapatan, biaya, dan laba kontrak konstruksi.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan

2.1.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal seperti penjualan, penghasilan, jasa, bunga, deviden, royalti, ataupun sewa (Kartikahadi 2019: 3).

Menurut IAI (2014) dalam buku Standar Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

2.1.2 Pengakuan Pendapatan

Menurut Kartikahadi, et al (2019) pada dasarnya, pengakuan dilakukan berdasarkan jenis transaksi yang terjadi. Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Suatu pendapatan muncul karena adanya penjualan persediaan, pemberian jasa, pendapatan akibat penggunaan suatu asset serta pendapatan diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:

1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli.
2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
4. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas.
5. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.
6. Pendapatan diukur berdasarkan jenis transaksi yang terjadi.

Pengakuan Pendapatan, yaitu :

1. Pendapatan kontrak diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima.